



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SUDIRMAN SULAIMAN**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **401251**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.155.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/120 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
4. Tanah Seluas 19926 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 19900 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 11706 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 2753 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 2749 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 515.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 632.685.082

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.417.685.082

III. HUTANG Rp. 739.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.678.685.082

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.